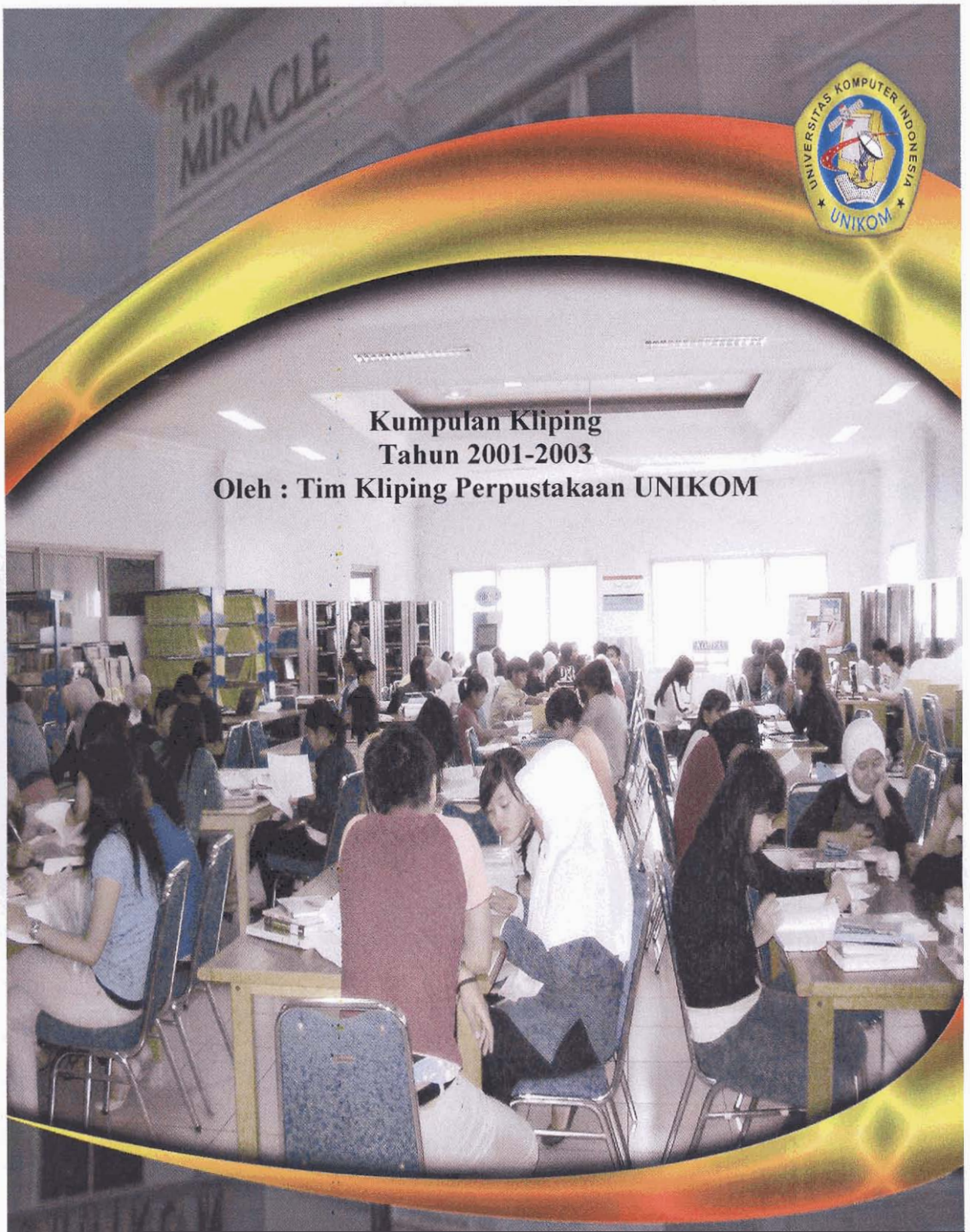


Kumpulan Kliping
Tahun 2001-2003
Oleh : Tim Kliping Perpustakaan UNIKOM

perpustakaan unikom

learning and get friendly with library

gedung 5 lantai 7
e-mail : perpus@unikom.ac.id

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : KAMIS / 17 / APRIL / 2003
Hlm/Kolom : 14 / 1-5
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis : Juliarto, Iwan
Subjek / NO. CLASS : KESEHATAN / 616.98

Langkah Surut bagi HAM dan AIDS

THAILAND menuai banyak kecaman akibat tewasnya lebih dari seribu orang pengedar narkotika dan obat-obatan berbahaya. Aksi pembunuhan ekstrayudisial ini selain menafikan hak asasi manusia juga menyurutkan penanggulangan AIDS di negara itu.

BOCAH laki-laki berusia sembilan tahun itu bercita-cita menjadi polisi, tapi tanggal 23 Februari lalu ia justru tewas tertembak polisi di Bangkok. Padahal, di sekolahnya ia baru saja menulis karangan mengapa ia ingin jadi polisi, yaitu "agar aku dapat menangkap penjahat dan berbuat baik untuk masyarakat." Ia membuat gambar dirinya sedang memegang pistol dan mengejar perampok.

Chakrapan Srisa-ard, nama bocah itu. Nama panggilannya, Nong Fluke. Ia tak pernah menyadari bahwa ayahnya, Sathaporn, menurut polisi diduga pengedar narkoba. Malam itu Fluke sedang naik mobil bersama kedua orangtuanya ketika sebuah *pick up* polisi membuntuti mereka.

Ayahnya menghentikan mobil lalu mencoba kabur, tapi beberapa polisi segera membekuknya. Melihat hal ini ibunya, Pornwipa Kerdrungruang, segera mengemudikan mobil dan tancap gas. Polisi memberondong mobil yang ternyata tak bisa kabur jauh karena terjebak kemacetan itu. Pornwipa dalam keadaan panik melarikan diri, meninggalkan Fluke yang tertembus dua butir peluru.

Fluke adalah satu di antara lebih dari 1.100 warga Thailand yang terbunuh selama bulan pertama kampanye perang melawan narkoba sejak awal Februari hingga akhir April ini. Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra menyatakan bahwa para pengedar narkoba itu sebagian besar mati akibat perang antargeng dan hanya sebagian kecil tertembak polisi yang membela diri.

"Jika polisi tak menembak, mereka akan ditembak. Jangan khawatir berlebihan dengan hidup pedagang amfetamin atau mereka akan menjual narkoba itu ke anak-anak Anda. Terbunuh bukanlah nasib yang tak lazim bagi orang jahat dan masyarakat tak perlu merasa risau dengan kematian mereka," katanya.

Umumnya kerabat pengedar narkoba yang tewas enggan memprotes secara terbuka. Namun, kematian Chakrapan alias Fluke telah memicu kecaman dan kritik dari tokoh-tokoh masyarakat dan aktivis LSM dan HAM di Thailand. Kematian bocah ini dan pembunuhan ekstrayudisial lainnya kemudian juga dipersoalkan oleh para diplomat Amerika dan negara-negara Eropa, yang membuat Kementerian Dalam Negeri Thailand sejak awal Maret lalu tak pernah lagi memperbarui jumlah angka kematian tadi.

Kecaman senada juga dilontarkan oleh Amnesti Internasional. "Kami memahami bahwa narkoba adalah sebuah masalah sosial yang amat besar di Thailand. Namun, orang-orang yang diduga menjadi pengedar narkoba seharusnya dibawa ke pengadilan, dan tidak dibunuh sebelum mereka memperoleh kesempatan membela diri. Sungguh fakta yang menyedihkan bahwa setelah catatan peningkatan HAM yang signifikan di [redacted]land selama 10 tahu[redacted]er-akhir, pemerintah sekarang melakukan langkah yang amat mundur. Dorongan untuk melakukan pembunuhan ekstrayudisial diberikan di tingkat tertinggi dengan menempatkan para penegak hukum di bawah tekanan kuat untuk menunjukkan hasil atau kehilangan pekerjaan mereka," demikian pernyataan Amnesti Internasional.

Namun, masyarakat Thailand tak sedikit pula yang mendukung kebijakan "Petrus" (penembakan misterius) Thaksin Shinawatra, karena memang masalah narkoba di negeri itu sudah teramat kronis.

Menurut Badan Pengendalian Narkotik, dari 60 jutaan penduduk Thailand dan lebih dari tiga juta pengguna stimulan methamfetamin atau "pil gila", terutama remaja dan kaum muda. Dengan persentase 5,9 persen penyalahguna methamfetamin, Thailand menduduki peringkat tertinggi di dunia (di Thailand dikenal dengan sebutan ya ba, sedang di Indonesia dinamai shabu-shabu atau Ecstasy).

Konon, semua pil ya ba dibuat oleh suku Wa di Myanmar/Burma dan diselundupkan ke Thailand. Hanya dalam tempo sepuluh hari pertama operasi Perang Melawan Narkoba, polisi menyita 4,2 juta pil ya ba dan meringkus hampir 10.000 pengedarnya. Sejak beberapa tahun terakhir methamfetamin di Thailand menggeser posisi heroin atau opium yang dulu banyak ditanam oleh suku-suku pegu-

nungan di utara atau diselundupkan juga oleh raja-raja narkotik Burma seperti Khun Sa.

Yang mengherankan, bagaimana pabrik-pabrik methamfetamin di Burma bisa memperoleh bahan baku kimia atau prekursor untuk pembuatan psikotropik itu? Tidak mustahil bahan bakunya dipasok oleh orang Thailand sendiri. Jika di Tangerang saja ada pabrik Ecstasy terbesar di dunia, mengapa orang Thailand sendiri tak bisa membuatnya?

◆◆◆

SELAIN berkaitan dengan soal kriminalitas dan sosial yang serius, narkoba juga menjadi ancaman bagi kesehatan masyarakat, khususnya penularan HIV dan hepatitis C. Di kalangan pengguna narkotik jarum suntik (IDU) di Thailand, tingkat infeksi HIV tergolong amat tinggi, yaitu 35-40 persen antara tahun 1989-1997. Tahun 1998 meningkat menjadi 42,5 persen dan mencapai puncaknya pada tahun 1999, yaitu 50,8 persen. Tahun 2000 menurun sedikit menjadi 47,2 persen.

Tingkat infeksi di atas 40 persen ini diperkirakan terus berlangsung hingga sekarang, suatu angka yang mulai disamai oleh Indonesia. HIV tidak hanya mereka saling tularkan lewat jarum suntik, tapi juga mereka lewat hubungan seks, karena 95 persen dari IDU berusia 21 tahun di Thailand biasa melakukan hubungan seks.

Beberapa pengamat amat menyayangkan kebijakan pemerintah Thailand melakukan pengejaran dan pembunuhan para pengedar narkoba sejak awal Februari lalu, karena dinilai dapat merongrong dan menyurutkan keberhasilan penanggulangan HIV/AIDS di negara itu.

Di antaranya adalah Nimit Tienudom, Direktur Yayasan AIDS ACCESS. Ketika ditemui di kantornya pertengahan Maret lalu, ia menyatakan bahwa dirinya dan banyak LSM AIDS lainnya serta sekitar 100 akademisi mengirim surat ke PM Th Shinawatra menanyakan soal kebijakan pembunuhan ekstrayudisial itu.

"Surat kami tak pernah dijawab. Selain melanggar HAM, kebijakan itu jelas akan menghambat upaya *harm reduction* di kalangan IDU, sehingga akan meningkatkan lagi kasus infeksi baru HIV di masyarakat. Para pengguna narkotik yang sebagian untuk bisa terus memakai harus menjadi pengedar kecil-kecilan akan bersembunyi, sehingga makin sulit menjangkau mereka," kata Nimit.

ACCESS yang dipimpinnya—menggantikan tokoh terkemuka LSM AIDS, Jon Ungphakorn yang kini menjadi senator—memang lebih banyak berkiprah dalam advokasi dan memberikan akses pengobatan kepada orang-orang yang mengidap HIV/AIDS. Namun, organisasinya juga melakukan penjangkauan kepada para narapidana di penjara Bang Kuang di Bangkok agar mereka tidak saling menularkan HIV lewat jarum suntik.

"Kebijakan Pemerintah Thailand masih menentang *harm reduction* yaitu tidak membagi-bagikan jarum suntik steril. Karena itu kami hanya menyuluh agar para IDU mensterilkan jarum suntik mereka dengan cairan *bleaching* seperti deterjen," tutur Nimit.

Ia melihat kebijakan PM Thaksin memberantas narkoba mirip dengan kebijakan mantan PM Chuan Lek Pai yang menutup tempat-tempat pelacuran. Keduanya mempersulit upaya penjangkauan untuk *harm reduction* (pengurangan dampak buruk) untuk mencegah penularan HIV.

"Padahal, ACCESS sudah dengan susah payang mengidap HIV, dan memamerkan foto mereka di Konferensi Internasional AIDS di Kuala Lumpur. Foto-foto dan suara hati mereka sudah dibukukan dalam album bahasa Inggris *My Positive Life* dan buku dalam bahasa Thai berjudul *Hari-hari Perubahan*. Mereka ada yang tertular HIV dari prostitusi, jarum suntik, tetapi tak sedikit juga adalah ibu rumah tangga yang tertular dari suami mereka. Lima orang di antara mereka kini sudah meninggal," kata Nimit.

◆◆◆

SALAH satu dari 46 warga Thai, yang fotonya dipamerkan dan dibukukan oleh ACCESS, adalah Paisan alias Ott (38). Ia tertular HIV sejak tahun 1990 karena ia kecanduan narkotik. "Ini adalah kesalahan yang bisa terjadi pada siapa saja, dan sekali itu terjadi sekalipun tak bisa memperbaiki, kami tetap dapat menjadi orang yang baik," komentarnya di album *My Positive Life*.

Di dalam buku *Hari-hari Perubahan*, Ott yang pernah menjadi Ketua TNP+ (Thai Network of People Living with HIV/AIDS) mengungkapkan harapannya, agar masyarakat mau membuka diri dan memberi kesempatan kepada para IDU. Ia juga berharap agar masyarakat mau lebih memahami persoalan HIV/AIDS. Sejak beberapa tahun lalu ia aktif menolong orang-orang dengan HIV/AIDS di shelter Alden House di Bangkok, sementara istrinya di lembaga yang sama di Chiang Rai. Istrinya yang ikut juga difoto oleh ACCESS adalah janda yang tertular HIV dari suami pertamanya. Ott meminta kepada *Kompas* untuk tidak memuat foto mereka.

Sejak akhir pekan lalu Ott sibuk di Chiang Mai, ikut menyiapkan dan mengikuti Konferensi Internasional ke-14 Pengurangan Dampak Buruk Narkotik yang berlangsung 6-10 April ini. Kepada Menteri Kesehatan Masyarakat, Ny Sudarat Keyuraphan yang membuka konferensi, Ott dan teman-temannya para IDU atau bekas IDU yang tergabung dalam The Thai Drug Users Network menyampaikan delapan butir petisi. Antara lain menyerukan segera dihentikannya pembunuhan ekstrayudisial orang-orang yang diduga menjadi pengedar narkoba. Mereka juga meminta agar agar dilibatkan dalam pengembangan kebijakan dan program yang menyangkut mereka. termasuk dalam penanggulangan HIV/AIDS.

"Kami menolak ide bahwa hidup kami tak berguna dan para pengguna narkotik harus disingkirkan," demikian seruan Ott dan teman-temannya.

Indonesia dapat belajar banyak dari kesalah-an-kesalahan dan keberhasilan Thailand dalam penanggulangan pelacuran, narkotik dan HIV/AIDS. Pada saat *demand* [illegible]*on* seperti penyuluhan *Just say no to prostitution and drugs* mandul, kekerasan untuk *supply reduction* pelacuran dan narkotik bukanlah jalan pintas yang pas. Kita justru perlu melibatkan mereka yang bergelimang dalam pelacuran dan narkoba.

(IRWAN JULIANTO)

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : KAMIS / 22 / MARET / 2001
Hlm/Kolom : 26 / 1-9
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat / .....
Penulis : PURBO, Onno W
No_Klass/Subjek : 621.382 / TELEKOMUNIKASI - ALAT DAN PERLENGKAPAN

Sediakan "Broadband" Tanpa Telkom dan Tak Perlu Izin

MUDAH-mudahan tulisan saya tidak memperkeruh suasana industri pertelekomunikasian di Indonesia yang memang sudah keruh. Karena pihak Telkom tidak mampu memberikan layanan *broadband* (2-622 Mbps) untuk akses Internet dan warung telekomunikasi di sebagian besar tempat di Indonesia.

KALAUPUN ada, biasanya apa yang ditawarkan Telkom biasanya mahal dan kadang-kadang kualitasnya tidak terlalu baik (*availability* kurang dari 99 persen). Sebagai gambaran biaya *leased line* Telkom 2Mbps adalah sekitar Rp 10 juta per bulan, bahkan sebagian menyebutkan 10.000 dollar AS per bulan untuk saluran ISDN PRA. Belum lagi kalau meminta 10-622 Mbps, bisa dipastikan harganya akan sangat aduhai dan belum tentu bisa dilayani karena kabel tembaga Telkom tidak mampu dipakai pada kecepatan tinggi di atas 10 Mbps.

Namun beruntung, dengan dalih ketidakmampuan Telkom ini untuk memberikan infrastruktur data kecepatan tinggi 2-622 Mbps bagi masyarakat khususnya masyarakat Internet, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 Tahun 2000 Pasal 45 maupun berbagai draf Keputusan Menteri (Kepemen) terutama RKM Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus (Telsus) maka masyarakat mempunyai hak untuk membangun jaringan telekomunikasi sendiri.

Naskah lengkap PP No 52/2000 maupun berbagai RKM dapat di-*download* dari Internet di http://www.postel.go.id dan http://www.internews.or.id. Kutipan kata-kata PP No 52/2000 Pasal 45 tentang hal ini adalah sebagai berikut:

Pasal 45, 1. *Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d dilaksanakan oleh badan hukum untuk mendukung kegiatan dan atau usahanya.* 2. *Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan badan hukum dapat diselenggarakan jika:*

a. keperluannya tidak dapat dipenuhi oleh penyelenggara jaringan dan atau jasa telekomunikasi;

b. lokasi kegiatannya belum terjangkau oleh penyelenggara jaringan dan atau jasa telekomunikasi; dan atau

Salah satu contoh nyata perjuangan PP No 52/2000 Pasal 45 adalah perjuangan untuk mempermudah izin frekuensi 2,4 GHz Band yang memungkinkan untuk mempunyai akses data pada kecepatan 2-11 Mbps. Seperti diketahui infrastruktur *wireless* 2,4 GHz telah menjamur di kota-kota Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Malang, dan lain-lain.

c. kegiatannya memerlukan jaringan telekomunikasi yang tersendiri dan terpisah.

◆◆◆

SALAH satu contoh nyata perjuangan PP No 52/2000 Pasal 45 adalah perjuangan untuk mempermudah izin frekuensi 2,4 GHz Band yang memungkinkan untuk mempunyai akses data pada kecepatan 2-11 Mbps. Seperti diketahui infrastruktur *wireless* 2,4 GHz telah menjamur di kota-kota Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Malang, dan lain-lain.

Belum lagi dengan semakin murahnya peralatan yang mengikuti standar IEEE 802.11a yang memungkinkan untuk bekerja pada kecepatan 54 Mbps pada frekuensi 5,8 GHz yang juga masuk ISM Band, jelas akan membuat kacau peta pertelekomunikasian Indonesia lebih lanjut. Bagi pembaca yang ingin turut berjuang untuk mempermudah perizinan dapat berinteraksi dan berdiskusi langsung dengan rekan yang lain maupun dengan pemerintah di *mailing list* indowli@yahoogroups.com.

Pada kesempatan ini, saya tidak akan mengulas teknologi *wireless* Internet pada frekuensi 2,4 GHz maupun 5,8 GHz yang mempunyai kecepatan antara 2-54 Mbps. Tetapi, saya akan mencoba membahas teknologi komunikasi data berkecepatan 2-622 Mbps (saya eja enam ratus dua puluh dua juta bit per detik). Yah kira-kira membutuhkan waktu kurang dari 10 detik untuk mengirimkan satu *hard disk* 1 Gbyte atau sebuah film VCD format MPEG-1 / MPEG-2 dengan lama tayang satu jam melalui infrastruktur ini. Semua ini dapat dilakukan tanpa campur tangan Telkom dan tidak perlu izin.

Gilanya, infrastruktur ini bekerja pada frekuensi 325-350 THz (THz kependekan dari TeraHertz atau 1.000 GigaHertz). Frekuensi tersebut mempunyai panjang gelombang 860-920 nanometer (nm) di daerah frekuensi cahaya mendekati inframerah. Betul, infrastruktur ini bekerja menggunakan cahaya mendekati inframerah (*near infrared*) untuk komunikasi pada kecepatan sangat tinggi ini. Cahaya yang digunakan tidak terlihat mata telanjang, karenanya sangat berbahaya jika diarahkan ke mata dalam waktu yang lama.

◆◆◆

PEMANCAR yang digunakan biasanya berupa Light Emitting Diode (LED) untuk jarak dekat beberapa ratus meter antargedung, dan untuk jarak jauh sampai empat-enam kilometer

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : ...../...../...../.....
Hlm/Kolom : ...../.....
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat / .....
Penulis : .....
No_Klass/Subjek : ...../.....
.....

menggunakan semikonduktor laser dengan daya sekitar 100 mW. Semikonduktor laser tersebut biasanya dibuat dari campuran bahan AlGaAs atau InGaAsP. Kira-kira mirip-miriplah dengan *laser pointer* yang sering digunakan pada saat melakukan presentasi, hanya saja cahaya inframerah yang dipancarkan dibuat stabil dan bisa dimodulasi untuk mengirimkan data berkecepatan sangat tinggi.

Nah, kebetulan sekali Postel maupun lembaga regulasi telekomunikasi mana pun di dunia yang bernaung di bawah International Telecommunication Union (ITU) seperti Department of Communication (DOC) di Kanada atau FCC di AS hanya meregulasi frekuensi sampai 400GHz; dan tidak mengatur di atas frekuensi tersebut. Hal ini bisa dibaca di RKM Alokasi Frekuensi http://www.postel.go.id maupun di naskah ITU S5.

Sistem pemancar inframerah yang digunakan biasanya menggunakan sambungan kabel serat optik yang dapat terhubung langsung ke berbagai kecepatan data maupun *interface* jaringan, apakah itu pada kecepatan T1 (1,5 Mbps), E1 (2 Mbps), T3, E3, Ethernet (10 Mbps), Fast Ethernet (100 Mbps), Token Ring, Video, dan ATM/OC-3 (155 Mbps) beberapa vendor telah menawarkan kecepatan OC-12 (622 Mbps) menggunakan konverter media yang ada.

Artinya apa? Jelas bahwa peralatan komunikasi menggunakan cahaya dapat digunakan tanpa perlu memohon izin frekuensi terlebih dahulu ke pemerintah. Tidak perlu bertengkar, tidak perlu pusing dengan birokrasi.

Nah saya yakin pembaca sudah mulai penasaran dengan peralatan yang saya maksud. Beruntung sekali, peralatan tersebut saat ini sudah mulai banyak tersedia di dunia. Sebagian besar dapat dilihat di Internet, antara lain yang baik adalah:

http://infraredsystems.net
http://www.pavdata.com
http://www.lsainc.com
http://www.silcomtech.com

Berapa harga peralatan tersebut? Pada saat saya menulis artikel ini di awal tahun 2001, peralatan tersebut dapat diperoleh seharga 6.000-8.000 dollar. Untuk peralatan yang sangat baik dengan kemampuan mengatur atau mengejar cahaya jika terjadi goyangan gedung karena angin dan lain-lain, akan membutuhkan biaya beberapa puluh bahkan ratus ribu dollar.

Memang masih relatif mahal, tetapi masih sangat murah jika dibandingkan dengan solusi yang diberikan 2 Mbps-nya Telkom yang sudah mendekati 1.000 dollar per bulan. Padahal dengan teknik komunikasi inframerah ini (6.000-8.000 dollar) sudah mendapat 155-622 Mbps. Apalagi tanpa biaya bulanan maupun izin. Bahkan bukan mustahil di kemudian hari akan semakin jatuh harga peralatan komunikasi cahaya ini.

♦♦♦

PADA dasarnya perangkat ini transparan terhadap protokol komunikasi data maka memungkinkan untuk mengirimkan data digital, video, Internet telepon (VoIP), ATM, dan lain-lain. Aplikasi yang bisa dikembangkan sangat beragam sekali mulai dari sambungan antargedung seperti Metropolitan Area Network (MAN), Campus Network, rumah sakit.

Termasuk akses Internet dan infrastruktur untuk meningkatkan kapasitas *bandwidth*, menggantikan *leased line*, cadangan *backbone*, servis kecepatan tinggi ke apartemen, rumah, mal dan hotel; pengiriman video berkualitas baik seperti pada acara olahraga, pengindeaan, monitoring lalu lintas dan konferensi video; sambungan sementara seperti bencana alam sambungan pengganti saat terjadi kerusakan jaringan fibre optik; mengatasi berbagai masalah yang terjadi karena tidak mungkin untuk memperoleh izin atau kesulitan akses seperti menyeberangi jalan, sungai, danau, menembus hutan maupun pegunungan, daerah urban atau perumahan penduduk.

Peralatan yang dibutuhkan untuk sebuah sambungan inframerah ini terdiri dari dua buah *transceiver* (pemancar dan penerima) berikut catu dayanya yang tersambung melalui kabel serat optik ke media konverter yang akan mengonversikan ke standar *interface* jaringan LAN yang akan digunakan. Penggunaan kabel serat optik antara media konverter dan *transceiver* menguntungkan untuk menghilangkan gangguan petir maupun interferensi gelombang elektromagnetik lainnya.

Sistem pemancar inframerah yang digunakan biasanya menggunakan sambungan kabel serat optik yang dapat terhubung langsung ke berbagai kecepatan data maupun *interface* jaringan, apakah itu pada kecepatan T1 (1,5 Mbps), E1 (2 Mbps), T3, E3, Ethernet (10 Mbps), Fast Ethernet (100 Mbps), Token Ring, Video, dan ATM/OC-3 (155 Mbps) beberapa vendor telah menawarkan kecepatan OC-12 (622 Mbps) menggunakan konverter media yang ada

Penempatan *transceiver* dilakukan di atas atap gedung untuk memperoleh sambungan langsung yang tidak terhalang sama sekali (*line of sight*). Peralatan untuk penempatan *transceiver* inframerah cukup banyak ragamnya mulai dari tripod, pengatur azimuth dan elevasi yang kasar maupun yang halus dan lain-lain.

♦♦♦

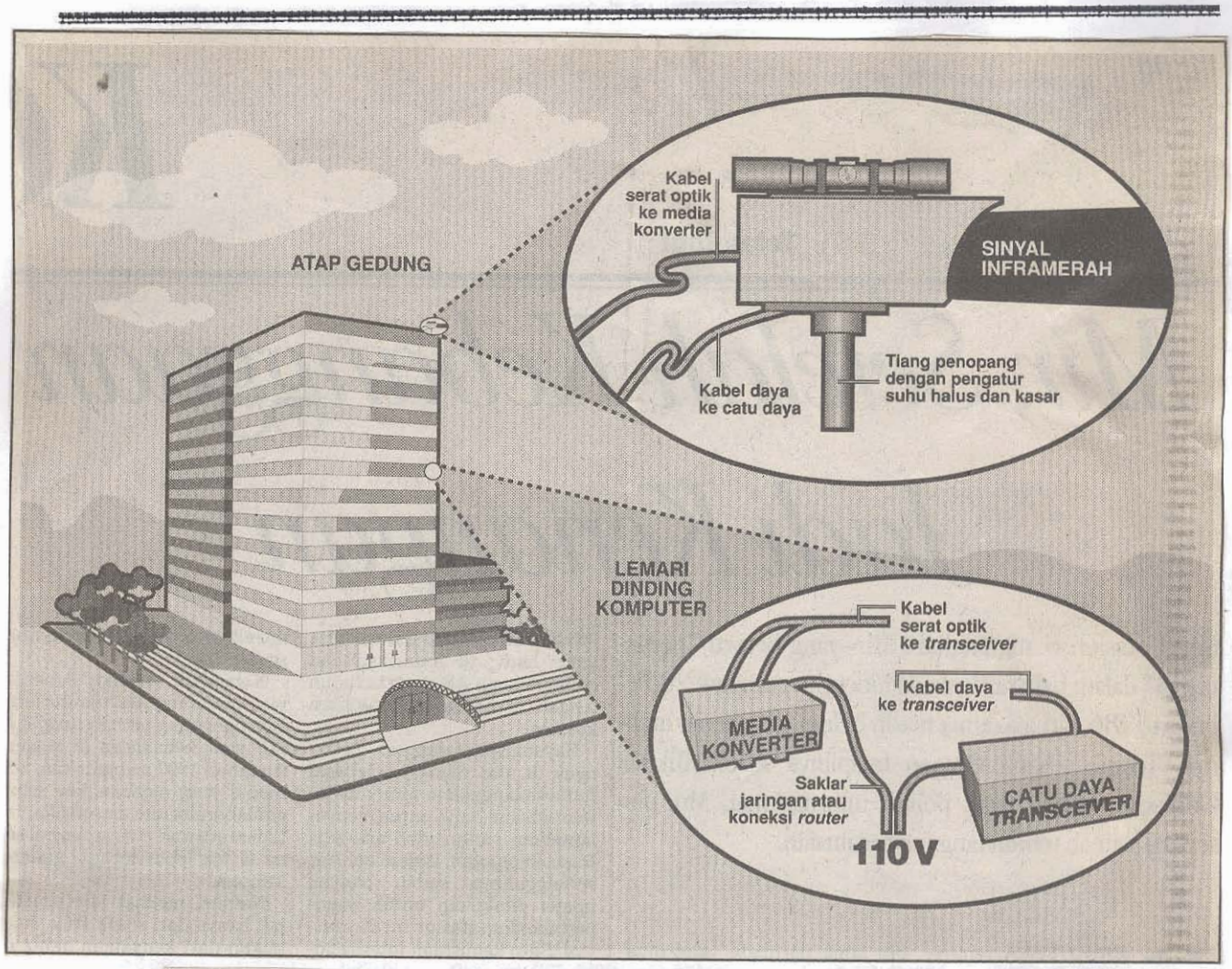
RANCANGAN sistem yang dibuat umumnya mampu untuk bertahan pada berbagai kondisi cuaca karena adanya margin daya di sambungan sebesar 20-30 dB untuk mengatasi gelombang cahaya maupun cuaca buruk seperti hujan sangat lebat atau kabut tebal. Sistem *transceiver* sendiri diperlengkapi peralatan untuk mengatasi hujan, es, salju yang mungkin akan menghalangi jendela muka. Dengan lapisan khusus dan filter memungkinkan energi dari cahaya matahari untuk tidak masuk dan unit bekerja dengan baik walaupun mengarah hanya satu derajat dari matahari.

Untuk memudahkan instalasi biasanya peralatan tersebut disertai dengan peralatan untuk membidik yang memungkinkan proses instalasi dilakukan dalam waktu beberapa menit saja. Apalagi dipandu dengan LED diagnostik di belakangnya dan pengukuran daya yang diterima. Untuk meningkatkan reliabilitas, semikonduktor laser yang digunakan didinginkan sehingga awet untuk aplikasi jaringan telekomunikasi privat.

Dalam komunikasi cahaya ini, hubungan komunikasi lurus dan haruslah bersih dari gangguan fisik—istilah kerennya *line of sight*. Untuk menghindari perubahan refraksi indeks cahaya, cahaya diusahakan dilewatkan ke wilayah yang tidak panas dan tidak memantulkan cahaya seperti atap gedung yang panas di siang hari. Jika lewat burung atau pesawat terbang, akan terjadi interupsi komunikasi sebentar yang kemudian dinormalkan kembali oleh protokol komunikasi data.

Ketersediaan sambungan dan jarak menjadi isu utama dalam komunikasi data kecepatan tinggi. Umumnya sistem komunikasi data kecepatan tinggi seperti ini mempunyai tingkat ketersediaan sambungan yang cu-

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun :
Hlm/Kolom :
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat /
Penulis :
No_Klass/Subjek :



kup tinggi sekitar 95-100 persen. Sambungan radio *microwave* biasanya sangat terganggu dengan hujan, sedang komunikasi data inframerah ini lebih banyak terganggu karena kabut. Kita cukup beruntung, kabut biasanya hanya ada pada pagi hari di mana aktivitas kita masih belum padat, sehingga sedikit berkurangnya ketersediaan sambungan masih dapat ditolerir.

Jika tingkat ketersediaan sambungan sangat penting, ada baiknya membatasi jarak penggunaan sistem untuk jarak yang lebih pendek. Juga sebaiknya disediakan cadangan sambungan *leased line* seperti E1 atau sambungan *dial-up* yang murah sebagai alternatif pada saat cuaca buruk. Tentunya sambungan redundan ini tidak dibutuhkan jika terputus sementaranya sambungan tidak demikian kritis.

Mudah-mudahan, tulisan ini dapat memberikan inspirasi bagi teman-teman yang ingin membangun jaringan komunikasi data berkecepatan tinggi, tetapi memperoleh kesulitan *leased line* data kecepatan tinggi dari operator infrastruktur. Sistem yang dijelaskan pada tulisan ini sudah dioperasikan oleh beberapa teman di kota besar di Indonesia.

◆ **Dr Onno W Purbo**, *penulis teknologi informasi independen*

Perpustakaan Unikom

hlm. 356

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : JUMAT ... / 11 ... / OKTOBER ... / 2002
Hlm/Kolom : 29 ... / ... 1-8
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis :
No_Klass/Subjek : 621.382 / PERANGKAT TEKNOLOGI

Canon Expo 2002

Menuju ke Gaya Hidup Digital

TERASA kalau ada perbedaan penting antara perusahaan teknologi asal Asia dan negara Barat lain, setidaknya ini yang dirasakan *Kompas* ketika menghadiri Canon Expo 2002 yang diselenggarakan di Beijing, RRC, pada awal bulan September yang lalu. Dari cara berpakaian saja sudah menunjukkan perbedaan yang cukup mencolok antara para eksekutif asal Jepang dengan para mitranya di belahan bumi yang lain.

ACARA Canon Expo 2002 ini, misalnya, mengharuskan para pesertanya mengikuti *code dress*, sesuatu yang tidak lazim di kalangan industri teknologi komunikasi informasi yang selalu merefleksikan sebuah perubahan yang cepat, persaingan yang ketat, serta menghadirkan berbagai inovasi mutakhir yang mampu menggoyang perdagangan dan perekonomian dunia.

Memang *code dress* sendiri bukan merupakan sebuah esensi yang pokok pada acara Canon Expo 2002 ini, sehingga memang memerlukan waktu tersendiri untuk menyelami dan memahami sepak terjang yang ingin disampaikan oleh para eksekutif Canon pada acara tersebut. Sekilas, para eksekutif perusahaan teknologi asal Jepang ini sangat kaku dalam membawa kita mengenali seluk-beluk teknologi informasi buatan perusahaan ini. Dinamika teknologi komunikasi informasi yang selalu gegap gempita tidak terlalu menonjol dalam acara Canon Expo 2002 ini.

Namun, di sisi lain, antusias para distributor serta masyarakat Cina pada acara Canon Expo 2002 ini pun ternyata luar biasa. Liputan media massa lokal pun terasa sangat menggebu, animo pengunjung pun luar biasa khususnya perhatian mereka pada produk-produk imaging buatan Canon seperti kamera, lensa, dan mesin pencetak printer. Kehadiran CEO Canon Inc., Fujio Mitarai (66), pada acara Canon Expo 2002 ini juga memberikan sebuah nuansa lain serta perspektif betapa pentingnya pasaran RRC bagian perusahaannya.

Pidato Mitarai pada acara Canon Expo 2002 ini menunjukkan secara jelas betapa pentingnya pasaran Cina bagi produk-produk Canon. "Kita sudah bekerja selama delapan tahun, dan produk-produk Canon di Cina diterima dengan baik. Dan saya kira, produk kita bisa tumbuh berkembang bersamaan dengan perekonomian Cina," jelas Mitarai. Dan memang, berbagai papan reklame Canon bisa kita jumpai di seluruh daratan Cina, mulai dari wilayah pesisir timur di Provinsi Liaoning sampai ke ujung barat di Provinsi Xinjiang, dan berbagai produk Canon ini memang mudah didapatkan di pasaran.

Esensi paling penting dari Canon Expo 2002 ini sebenarnya adalah sebuah pengumuman kalau daratan Cina akan dijadikan Canon sebagai sebuah pasaran bagi berbagai produknya, serta menjadi negara berpenduduk terbesar di dunia dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil selama dua dekade terakhir ini sebagai pusat produksinya. Kalau sebelumnya investasi Canon di daratan Cina mengharuskan berbagai produknya diekspor dan kemudian diimpor untuk masuk ke pasaran RRC, sekarang Canon bisa langsung menjual produk buatannya yang tersebar di lebih dari 10 pabrik di seluruh daratan Cina.

Kecenderungan baru

Esensi lain dari acara Canon Expo 2002 ini adalah perumusan sebuah visi ke depan tentang peran dan terjang Canon sebagai sebuah usaha yang bergerak di bidang fotografi dan solusi gambar digital (*digital imaging solutions*), setidaknya dalam pengamatan *Kompas* untuk jangka waktu lima tahun ke depan. Ini juga tercermin dari pidato Mitarai pada acara tersebut yang menyebutkan akan mengalokasikan dana sebesar 1,7 milyar dollar AS untuk penelitian dan pengembangan tahun 2002 ini, dengan tambahan 77 juta dollar AS khusus untuk penelitian pada gambar-gambar digital.

Angka ini sebenarnya mungkin belum seberapa dibanding dengan Microsoft Corporation yang tahun lalu mengumumkan alokasi dana penelitian dan pengembangan sekitar 5 milyar dollar AS yang disebar ke beberapa beberapa lab Microsoft yang terdapat di AS, Inggris, RRC, dan di India. Angka besarnya anggaran penelitian dan pengembangan Canon ini juga tidak menunjukkan seberapa besar sebenarnya dana tersebut dialokasikan di daratan Cina yang menjadikan Beijing sebagai pusat pengendalian bisnis Canon untuk kawasan Asia-Pasifik.

Kalau melihat alokasi dana sebesar 77 juta dollar AS untuk penelitian gambar digital, memang jumlahnya belum mencapai 10 persen dari seluruh alokasi dana penelitian dan pengembangan yang ingin dilakukan Canon. Memang masih sulit untuk meraba apa yang ingin dicapai oleh Canon dengan alokasi dana seperti ini untuk menjadikan Canon sebagai pelopor global dalam solusi gambar digital dan fotografi.

Mitarai sendiri menekankan dalam pidatonya kalau era foto digital sudah tiba dan akan menjadikan rumah-rumah di seluruh belahan bumi ini sebagai lab foto tersendiri, di mana para pengguna kamera digital (walaupun tidak memiliki komputer PC) akan bisa mencetak foto-foto digital langsung

hlm. 328

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : ...../...../...../.....
Hlm/Kolom : ...../.....
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat / .....
Penulis : .....
No_Klass/Subjek : .....
.....

ke pencetak printer. Kemampuan ini memang menjadi sebuah kecenderungan baru dalam era digitalisasi sekarang ini, berbagai perusahaan kelas dunia seperti Hewlett-Packard, Epson, Lexmark, dan lainnya memang berlomba untuk menjadikan era digitalisasi ini sebagai sebuah peluang baru dalam mendigitalkan gambar atau foto melalui berbagai perangkat pencetak dan pemindai (*scanner*).

Di sisi lain, kalau kita memperhatikan sejarah perkembangan Canon pada awal tahun 1950-an sebagai sebuah perusahaan manufaktur kamera murah berambisi untuk mengalahkan Leica asal Jerman dan berhasil, mungkin bisa memberikan gambaran betapa seriusnya Canon untuk menempatkan dirinya sebagai sebuah perusahaan pelopor berskala dunia. Ketika Canon berhasil merobohkan Xerox melalui kerja sama dengan Hewlett-Packard membuat pencetak dekstop dan mesin fotokopi digital, kapitalisasi Canon pun terus meningkat.

Majalah *Fobes* edisi tahun lalu menyebutkan Xerox dengan kapitalisasi pasar pada tahun 1999 mencapai 37 milyar dollar AS turun menjadi hanya 6 milyar dollar AS pada tahun 2001. Sebaliknya, Canon yang mulai dengan kapitalisasi pasar sebesar 15 milyar dollar AS pada periode yang sama menjadi 35 milyar dollar AS ketika berhasil menundukkan Xerox. Dalam wawancara dengan majalah *Forbes*, Mitarai pun berambisi mengincar Fuji dan Kodak yang juga dikenal bergerak dalam usaha digitalisasi gambar.

Perubahan desain

Mitarai memang bisa jadi memiliki ambisi besar untuk menjadi pelopor, setidaknya dengan 877 hak paten yang terdaftar di AS, menunjukkan kekuatan Canon sesungguhnya di bidang kamera, fotokopi, dan pencetak printer yang semuanya memang memiliki pangsa pasar yang besar dalam skala dunia. Kalau ambisi Canon diproyeksikan pada pasar Cina yang memang masif dan sesuai dengan proyeksi Pemerintah RRC untuk menjadi teknologi komunikasi informasi sebagai titik tolak baru bagi kemajuan modernisasi pembangunan dan perekonomian Cina, bisa jadi ambisi Mitarai menjadi sebuah kenyataan yang tidak terelakkan.

Memang, *Kompas* sendiri belum melihat ambisi Mitarai dalam bentuk produksi-produksi yang diluncurkan pada Canon Expo 2002 seperti pencetak foto langsung (*direct photo printer*) pada produk CP-10, CP-100, maupun pencetak bubble-jet pada printer seri S seperti S530D dan S830D, maupun pencetak seri terbaru yang disebut sebagai XNU seri i320 yang condong mengarah pada perubahan bentuk desain yang masih menggunakan teknologi mesin printer yang digunakan pada pencetak seri S300.

Hal yang sama juga masih terlihat pada pencetak S830D yang merupakan kelanjutan dari S820D (baca juga *Kompas* 28/7).

Pencetak terbaru Canon ini semuanya mengintegrasikan berbagai teknologi yang telah dikembangkan Canon, seperti Photo Noise Reduction yang menghilangkan distorsi titik-titik warna yang terdapat pada gambar-gambar yang dihasilkan dengan resolusi yang rendah, teknologi Vivid Photo yang memungkinkan untuk mencetak lingkup warna yang ditampilkan di layar monitor sehingga warna yang dihasilkan menjadi lebih optimal, serta teknologi Microfine Droplet yang mengatur ukuran tinta yang disemprotkan dari nozzle pencetak yang biasanya ada pada printer yang lebih mahal.

Teknologi terbaru yang dimiliki Canon sebenarnya terletak pada kamera digital profesional yang diumumkan pada pameran Photokina 2002 di Koln, Jerman, akhir bulan lalu.

Photokina, Canon mengumumkan kamera digitalnya terbaru Canon EOS-1Ds yang secara efektif menghasilkan 11 megapiksel. Canon EOS-1Ds ini adalah terobosan penting dalam kamera digital, baik untuk pengguna profesional maupun amatir, dengan kemampuan untuk menghasilkan resolusi 4064 x 2704 piksel di tengah-tengah persaingan 6 mengapiksel yang sampai sekarang masih belum tuntas.

Ada beberapa jenis kamera Canon baru yang diumumkan pada Photokina 2002 selain EOS-1Ds, seperti Powershot G3, Powershot S45, dan Digital Ixus v3 yang ditujukan bagi pengguna amatir. Diumumkannya EOS-1Ds ini mungkin merupakan sebuah refleksi pandangan Fujio Mitarai untuk menjadikan perusahaannya sebagai pelopor dunia foto digital. Loncatan kamera digital menggunakan 11 megapiksel bisa dipastikan meninggalkan pesaing lainnya yang masih terus berkutat pada kemampuan 6 megapiksel.

Gaya hidup

Memang masih perlu disimak lebih lanjut ambisi Mitarai dengan berbagai teknologi kembangan Canon untuk menjadi pelopor dalam bidang fotografi dan solusi gambar digital memasuki sebuah dunia yang akan diwarnai dengan gaya hidup digital ini. Satu yang bisa dicatat *Kompas* adalah Canon memiliki pasangan yang tepat dalam mengembangkan fotografi dan pencetak sebagai sebuah solusi digital yang utuh di mana perusahaan ini sangat menguasai dan mampu mengembangkan teknologi keduanya secara luas dan mendalam.

Di sisi lain, gabungan fotografi dan pencetak juga mengisyaratkan pandangan perspektif Mitarai untuk menjadikan Canon sebagai sebuah perusahaan yang mungkin kita bisa sebut sebagai konektivitas. Sekilas *Kompas* menangkap cerminan konektivitas sebagai upaya Canon untuk memenuhi ambisinya untuk menjadi pelopor. Ini mungkin setara dengan analogi perkembangan teknologi komunikasi informasi dalam dua dekade terakhir ini, tidak ada perangkat yang bisa berdiri sendiri betapa canggihnya perangkat tersebut.

Ibarat sebuah mesin faks yang sendirian tanpa mesin faks lain, maka perangkat mesin faks yang sendirian ini tidak akan mempunyai artinya kalau tidak bisa terkoneksi dengan mesin faks lain. Kamera digital maupun pencetak digital pun tidak akan mampu untuk berdiri sendiri dalam era digitalisasi ini, sehingga tidak mengherankan kalau berbagai perusahaan pun berlomba untuk menghasilkan kamera dan pencetak secara bersamaan seperti Hewlett-Packard, Epson, dan merek lainnya.

Bedanya, Canon dari awal adalah sebuah perusahaan yang sangat agresif untuk meneliti dan mengembangkan fotografi dan pencetak secara bersamaan dalam era digitalisasi sekarang ini. Ambisi Canon dalam melihat dunia digital dan jaringan kerja (*networking*) sebagai sebuah kesatuan ini akan menghasilkan berbagai teknologi-teknologi baru yang berbeda sama sekali dengan sebelumnya. Solusi digital bisa jadi merupakan terobosan penting dalam menggabungkan fotografi dan pencetak meninggalkan pasaran teknologi komunikasi informasi sekarang ini yang benar-benar terpuruk karena resesi

(RENE L. PATTIRADJAWANE)

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : ...../ ...../...../.....
Hlm/Kolom : ...../.....
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat / .....
Penulis : .....
No_Klass/Subjek : .....
.....



KOMPAS/RENE L PATTIRADJAWANE

Pelopor Global — *CEO Canon Inc, Fujio Mitarai pada pembukaan Canon Expo 2002 di Beijing, RRC, menyampaikan pidatonya untuk menjadikan perusahaannya sebagai pelopor global dalam fotografi dan pencetak printer memasuki gaya hidup digital di masa depan.*

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : ...../...../...../.....
Hlm/Kolom : ...../.....
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat / .....
Penulis : .....
No_Klass/Subjek : .....
.....



KOMPAS/RENE L PATTIRADJAWANE

Desain Baru — *Canon Expo 2002 antara lain meluncurkan desain baru printer* bubble-jet *yang disebut sebagai XNU i320 yang mengintegrasikan kemampuan untuk mencetak foto-foto digital tanpa menggunakan komputer PC. XNU i320 ini pada dasarnya menggunakan teknologi mesin printer seri S300 sebelumnya, dan printer ini diarahkan akan menjadi sebuah fenomena baru dalam digitalisasi gambar mengarah pada kemampuan untuk mendorong ke kehidupan digital yang baru di masa depan.*

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : KAMIS / 22 / MARET / 2001
Hlm/Kolom : 30 / I-9
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis :
No_Klass/Subjek : 622.3 / TAMBANG DAN SUMBER PERTAMBANGAN

Tambang Emas di Kebun Tebu

PULUHAN mesin penyedot lumpur dan pasir terus menderu-deru dari balik rumpun tebu yang sudah tak terawat. Dari mesin yang mereka sebut *dompeng* itulah sejumlah warga desa berharap mendapat biji emas. Pemilik kebun tebu yang "menjual" kebun garapannya itu seolah abai pada masa depan anak-cucunya yang harus menerima warisan lahan yang sudah rusak parah. Sejumlah lokasi bekas tambang emas rakyat yang kini sudah ditinggalkan penambang, terlihat jelas menyisakan kubangan luas dan dalam. Timbunan tanah bercampur batu-batuan kecil menggunung di sekitarnya. Lapisan subur tanah Kalimantan yang hanya tipis, lenyap dan kebun itu tak mungkin ditanami lagi.

LOKASI penambangan emas rakyat dalam tiga tahun terakhir tumbuh tanpa kendali. Lokasi penambangan yang semula berada di lahan tradisional milik warga setempat, kini telah memasuki kawasan perkebunan milik petani plasma Pabrik Gula (PG) Pelaihari. Pihak pabrik tidak bisa berbuat banyak untuk menyelamatkan kebun petani yang statusnya masih dalam penguasaannya. Kondisi keuangan PG yang tak pernah meraih untung sejak beroperasi 15 tahun lalu memaksa petani mencari jalan keluar sendiri untuk memperbaiki ekonominya. Dan ketika pengusaha *dompeng* merayunya, sebagian dari mereka tak lagi kuasa menolak.

"Kalau musim kemarau, lokasi *dompeng* itu seperti pasar," kata Nadalsyah menunjuk jalan setapak di areal perkebunan. Bagi pengojek seperti Nadalsyah, pedagang yang berburu emas keluar masuk areal penambangan merupakan sumber pendapatan di musim kemarau. Sedangkan pada musim hujan seperti bulan Februari ini sebagian pengusaha *dompeng* tidak menggarap lokasinya. "Terlalu banyak airnya," kata seorang penambang.

Sutomo (50) mengaku terpaksa mengusahakan kebunnya sebagai lokasi tambang. Awalnya, ia berkisah, kebun plasma seluas satu setengah hektar miliknya ditelantarkan PG sekitar tiga-empat tahun lalu. Lalu tiba-tiba kebun itu diserobot penduduk setempat untuk dijadikan lokasi penambangan. Tak dijelaskan bagaimana caranya mengusir penyerobot, ia kemudian malah melanjutkan usaha penambangan itu dengan menggarapkannya kepada pemilik *dompeng*, Hanafi.

"Daripada kebun saya rusak dan saya tidak dapat apa-apa, kan lebih baik saya yang dapat sedikit-sedikit," katanya. Tidak jelas benar kenapa dia tidak menutup lokasi *dompeng* itu yang jelas-jelas merusak lahan dan lingkungan.

Dari usaha penambangan yang dilakukan dengan bagi hasil itu, Sutomo mengaku setiap minggu minimal mendapat Rp 100.000 atau setahun bisa mencapai Rp 5,2 juta. Angka minimal itu terkesan jauh lebih besar daripada saat ditanami tebu yang paling banyak menghasilkan Rp 900.000 setahun.

Penghasilan yang didapat secara mudah itu kini dinikmati banyak petani plasma. Mereka tinggal ongkang-ongkang di rumah menunggu setoran bagi hasil dari pengusaha *dompeng*. Sistem bagi hasil didasarkan pada perolehan gram emas murni selama sepekan. "Umpama saya dapat 30 gram emas setelah dikurangi biaya mesin, 15 gram untuk anak buah," kata Hanafi yang mempunyai dua mesin *dompeng*. Lima belas gram sisanya kemudian dibagi antara pemilik lahan dan pengusaha dengan perbandingan 1:4. Artinya, kalau sepekan diperoleh 30 gram emas dari sebuah lokasi, pemilik lahan mendapat bagian emas tiga gram. Dengan harga emas murni Rp 70.000 per gram, sepekan pemilik lahan bisa mengantungi Rp 270.000.

◆◆◆

PENGALIHAN kebun tebu menjadi lahan pertambangan emas rakyat hanya salah satu upaya petani plasma PG Pelaihari di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, untuk memperbaiki nasibnya. Sebagian kecil petani kini menanami kebunnya dengan tanaman pangan semusim seperti jagung, padi ladang, ubi jalar, kacang tanah, terung, dan kacang panjang.

"Tetapi itu tidak semua. Hanya yang punya modal saja," kata G Lasno (58), pedagang pengumpul hasil bumi di Pasar Tanjung. Sebagian besar petani yang tak punya modal, menurut Lasno, terpaksa membiarkan kebunnya bera alias tidak ditanami.

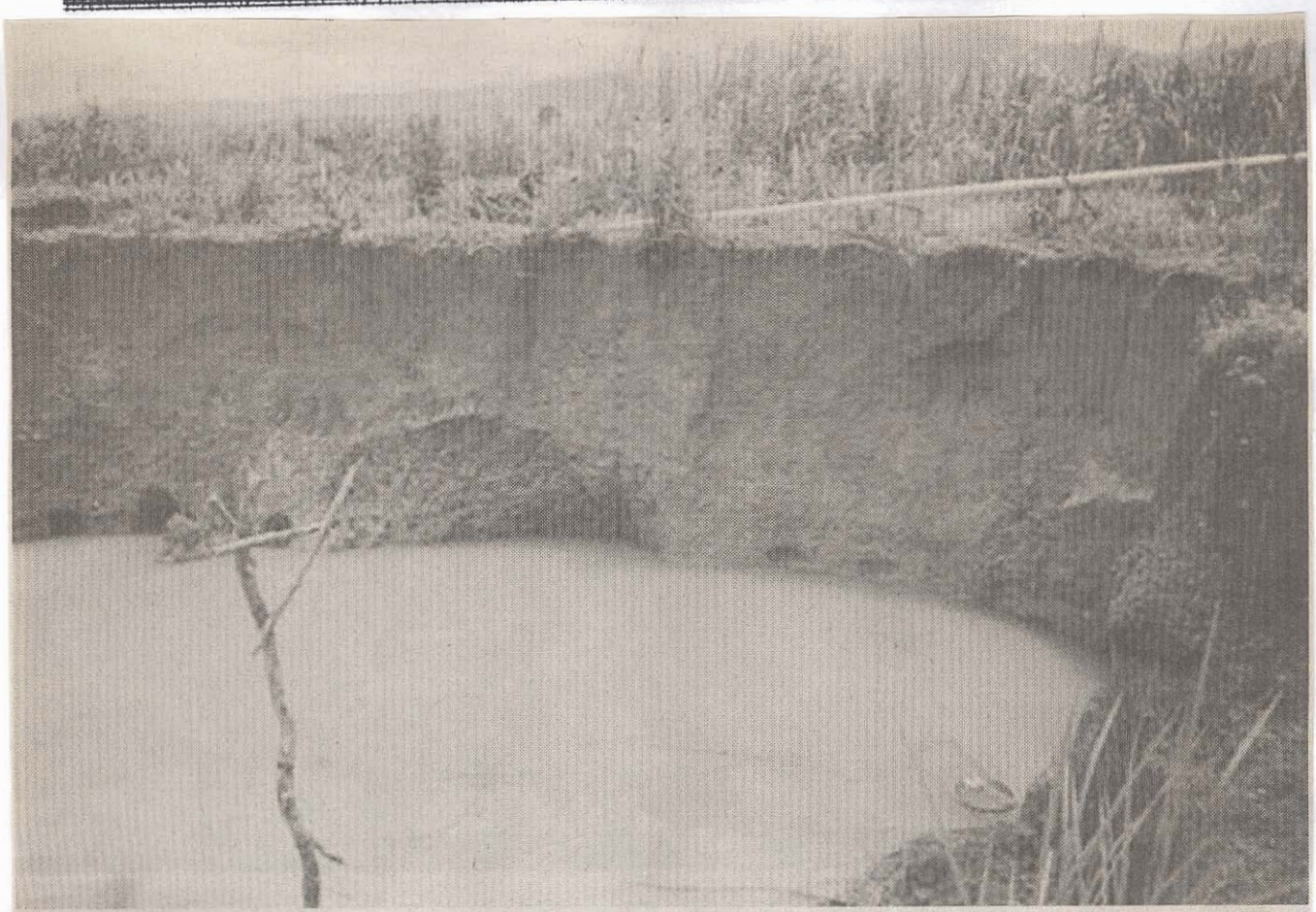
Persoalan modal itulah yang kini menghimpit petani mengingat selama bertani tebu entah itu dengan pola khusus, tebu rakyat murni, maupun tebu rakyat bebas, ternyata hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sangat minimal. Dari 500 kepala keluarga transmigran di Desa Tanjung, menurut Lasno, tak lebih dari 15 orang yang bisa menyekolahkan anaknya sampai SLTA. Pemilik sepeda motor bisa dihitung dengan jari. "Itu pun umumnya beli bekas," kata Nadalsyah.

Sulitnya kehidupan petani plasma dengan sangat sederhana digambarkan oleh Lasno. "Kalau sampai belasan tahun mau tilik (menengok) saudara di Jawa saja tidak bisa itu apa kurang susah? Padahal tujuan kami transmigrasi itu untuk memperbaiki nasib," katanya.

Oleh karena itu, petani plasma sekarang menantikan uluran tangan pemerintah setempat untuk membantu permodalan. Syukur ada investor lokal di bidang agrobisnis yang mau bekerja sama dengan petani dan membimbing mereka berusaha serta memberi informasi pasar.

Mereka juga mengharapkan

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : ...../...../...../.....
Hlm/Kolom : ...../.....
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat / .....
Penulis : .....
No_Klass/Subjek : ...../.....
.....



Kompas/m suprihadi

RUSAK — *Kubangan sedalam tiga-empat meter seperti inilah yang ditinggalkan penambang emas tanpa izin di areal kebun plasma PG Pelaihari, Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Demi penghasilan yang tak seberapa, sejumlah petani plasma merelakan tanahnya diobrak-abrik penambang tanpa memikirkan warisan untuk anak cucunya.*

kehadiran petugas penyuluh pertanian tanaman pangan ke lokasi kebun plasma yang kini sudah berubah menjadi ladang pertanian tanaman pangan. Sejak November lalu belum seorang pun penyuluh pertanian tanaman pangan yang masuk ke lokasi kebun plasma. "Yang ada hanya penyuluh peternakan," kata Lasno dan sejumlah petani lainnya. Bisa dimaklumi, karena warga setempat sebelumnya lebih dikenal sebagai peternak.

Dinas Pertanian, dalam hal ini pertanian tanaman pangan, sebaiknya segera berkoordinasi dengan PG membantu petani yang kini sudah tidak mendapat bagi hasil gula maupun santunan jaminan hidup. Ini karena mereka telah didatangkan ke Kalsel untuk sebuah tujuan politik masa Orde Baru yang kerap kali tidak melalui pertimbangan matang. Mereka adalah korban dari sebuah kebijakan pemerintah masa lalu dan kini memerlukan bantuan untuk memperbaiki nasibnya.

◆◆◆

MANAJEMEN PG Pelaihari kini sibuk mencari investor baru yang diharapkan mampu menyuntikkan dana segar untuk membiayai kebun inti yang berarti mempertahankan eksistensi pabrik gula. Sedangkan terhadap kebun plasma, investor bisa saja mengganti jenis komoditas yang ditanam.

Menurut Manajer Tanaman Ir Aditya, dua tahun lalu PT Sentramas pernah masuk sebagai investor di PG Pelaihari. Namun, akhirnya Sentramas tak tahan menanggung beban berat keuangan karena harus membayar bagi hasil kepada petani plasma yang produksinya kurang memenuhi standar. Bahkan kepada petani yang tidak menanam tebu pun, PG—artinya juga Sentramas—harus memberikan bagi hasil minimum yang besarnya 2,5 kuintal sekali panen.

"Itulah yang memberatkan," kata Aditya. Maka, Sentramas akhirnya mundur dan menjual kembali sebagian besar sahamnya ke PT Perkebunan Negara XIII sebagai pemilik lama.

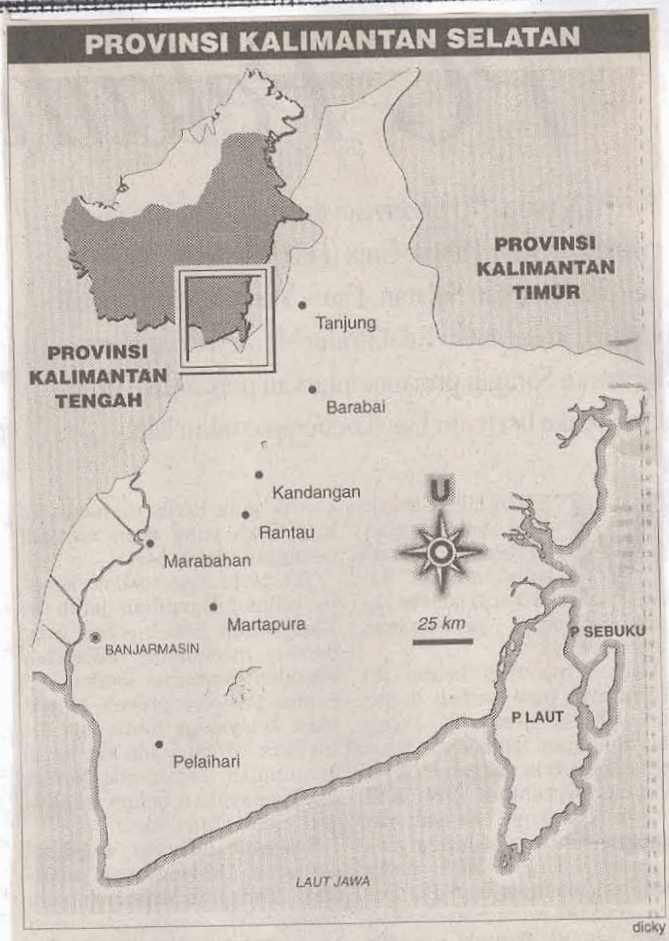
Sekarang, untuk merangsang investor baru, ketentuan bagi hasil minimum itu sudah dihapus. "Hanya petani plasma yang menanam tebu yang mendapat jatah bagi hasil," katanya. Pola bagi hasil pun diubah dari semula 60:40 menjadi 65:35. Jika terjadi risiko kebakaran, risiko ditanggung bersama antara PG dan petani. Tidak lagi hanya menjadi beban PG.

Dengan ketentuan baru itu, banyak petani yang lalu enggan menanam tebu. Tetapi itu tidak jadi soal karena kebun inti masih bisa memasok tebu selama musim giling. "Kapasitas pabrik tetap. Hanya periode giling menjadi lebih pendek," kata Aditya.

Dengan perubahan pola hubungan antara inti-plasma seperti itu, menurut Aditya, sudah ada beberapa investor yang melirik PG Pelaihari meskipun masih dalam tahap penjajakan. Gubernur Kalsel Sjachriel Darham pun, menurut Aditya, sangat memperhatikan nasib PG Pelaihari dan berusaha menawarkan kepada para investor.

Rangsangan lain yang diberikan kepada investor adalah kemungkinan mengganti jenis ko-

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : ...../...../...../.....
Hlm/Kolom : ...../.....
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat / .....
Penulis : .....
No_Klass/Subjek : ...../.....
.....



moditas di kebun plasma. Bahkan juga dimungkinkan memperluas areal ke lokasi di luar kebun plasma yang masih memungkinkan.

Kemungkinan besar, komoditas baru itu adalah kelapa sawit atau karet. Dan dua komoditi itu memang yang selama ini diminta petani plasma untuk memperbaiki ekonominya.

Persoalannya, sampai kapan petani plasma harus menunggu datangnya investor baru di tengah situasi perekonomian dan keamanan yang tidak menentu? Lalu bagaimana seandainya investor itu datang ketika petani plasma sudah menemukan jalan sendiri untuk memperbaiki nasib lewat pertanian tanaman pangan?

Kemungkinan itu diakui Direktur PG Pelaihari, Fauzi Yusuf MM dan sudah diantisipasi. "Kami sudah sosialisasikan kepada petani plasma tentang kemungkinan itu," katanya. Dan, sejauh ini petani plasma tidak keberatan pada kemungkinan pengalihan komoditas itu.

Menurut Aditya yang lebih banyak bergaul dengan petani, tanaman pangan yang selama ini ditanam petani plasma memang memberikan penghasilan lebih baik daripada hasil tebu sebelumnya. "Tetapi harus diingat bahwa jagung itu menguras kesuburan tanah, sehingga suatu saat harus dilakukan pemupukan intensif," katanya.

Tanaman pangan semusim seperti jagung, padi, kacang tanah, ubi jalar, dan sejenisnya itu juga memerlukan perawatan dan pengolahan yang intensif. "Karena semua pekerjaan dikerjakan sendiri, petani tidak menghitung biaya tenaga kerja. Maka hasilnya lalu dirasakan lebih besar," kata Aditya.

Sedangkan jika kebunnya ditanami sawit atau karet yang merupakan tanaman tahunan, petani mempunyai waktu lebih banyak untuk mengerjakan hal-hal di luar pertanian. Bahkan di masa-masa awal penanaman, petani masih bisa bercocok tanam tanaman pangan dengan sistem tumpang sari. Selama tanaman belum siap panen, petani tetap menjadi karyawan harian investor untuk menanam dan merawat tanaman.

Dengan tawaran seperti itu, petani, menurut Aditya, tidak keberatan karena memang tidak merasa dirugikan. Hanya, mungkinkah investor segera datang ketika situasi keamanan belum mendukung kepastian berusaha? **(msh)**

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : JUM'AT / 11 / OKTOBER / 2002
Him/Kolom : 2 /
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis :
No_Klass/Subjek : 623.4 / BOM

Lagi, Bom Guncang Filipina Selatan

KIDAPAWAN, KAMIS — Sedikitnya delapan jiwa melayang dan 19 orang lainnya luka-luka akibat terkena bom di terminal bus di Kota Kidapawan, selatan Filipina, Kamis (10/10). Militer dan polisi langsung melakukan investigasi untuk mengungkap motif penyerangan. Pemberontak komunis dan Muslim sebagai tersangka utama.

"Kami melakukan pemeriksaan terhadap kemungkinan keterlibatan Tentara Rakyat Baru (NPA) dan Front Pembebasan Islam Moro (MILF). Tetapi, kami tidak mengabaikan kelompok-kelompok teroris lain," kata juru bicara tentara regional, Julieto Ando.

Dugaan ini berkaitan dengan kegiatan NPA yang berjuang untuk mendirikan negara Marxist selama tiga dekade ini dan diketahui aktif di wilayah Kidapawan. MILF adalah kelompok utama pemberontak yang berjuang untuk mendirikan negara Muslim di wilayah selatan yang berpenduduk mayoritas Katolik.

NPA dan MILF sebelumnya mengtakan, mereka mempunyai "persekutuan taktik" di wilayah di mana keduanya beroperasi. MILF yang diperkirakan mempunyai 12.000 pasukan, telah melakukan perang gerilya sejak tahun 1978 ketika kelompok ini terpecah dengan Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF). Kelompok MNLF menandatangani perjanjian perdamaian dengan pemerintah tahun 1996.

Berdasar keterangan saksi mata, ledakan bom terjadi sekitar pukul 15.00 waktu setempat. Kemungkinan bom ditanam di bawah tempat orang menunggu bus. Waktu itu banyak pelaju tengah menanti di tempat yang terkena bom itu. Dua bus yang ada di dekat situ hancur akibat ledakan tersebut.

Menjelang petang, jumlah korban tewas sembilan orang, sedang 19 lainnya menderita luka-luka. Termasuk di antara korban meninggal adalah anak usia enam tahun yang tewas bersama ibunya.

Petugas mengkhawatirkan korban tewas akan bertambah karena beberapa di antara korban luka-luka dalam keadaan kritis.

Serangan kedua

Ledakan bom hari Kamis itu merupakan serangan kedua yang terjadi di selatan Filipina sejak 2 Oktober. Pada serangan pertama, kelompok Abu Sayyaf meledakkan bom di Kota Zamboanga, menewaskan seorang warga Amerika Serikat (AS) dan tiga warga Filipina.

Sementara itu, sebuah bom rakitan yang mirip dengan sebuah bom yang digunakan pada serangan 2 Oktober, ditemukan dari sebuah kendaraan pelaju di Zamboanga, Kamis. Bom tersebut disembunyikan di sebuah minibus oleh seorang penumpang yang tidak diketahui identitasnya, Rabu malam, dan ditemukan kemudian oleh sopir. Demikian keterangan Kepala Polisi Regional Simeon Dizon.

Seorang warga negara Jordania ditahan oleh pihak imigrasi, diduga mempunyai kaitan dengan serangan di Zamboanga. Namun, pejabat setempat mengatakan, kemungkinan orang tersebut akan dideportasi secepatnya karena polisi tidak mendapatkan bukti untuk membawa kasus ini ke pengadilan kriminal.

Pria berusia 36 tahun tersebut dibawa ke pengadilan Manila, Selasa, untuk tuduhan pelanggaran keimigrasian.

"Kami tidak mempunyai (bukti) apa pun yang bisa mengkaitkan dia dengan aktivitas tersebut," kata polisi.

Sumber intelijen militer mengatakan, mereka mencurigai seorang Palestina. Koran Filipina mengabarkan, Biro Investigasi Federal (FBI) AS dan militer Filipina mencari orang tersebut yang diyakini memiliki bom. (AFP/REUTERS/RET)

Hari / Tanggal / Bulan / Tahun : ...
Hlm/Kolom : 14 / 1-5
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat /
Penulis :
Subjek / NO. CLASS : INDUSTRI MARITIM / 623.8

10 Miliar Dollar AS Diraup Pelayaran Asing Setiap Tahun

JAKARTA, KOMPAS — Meskipun Indonesia merupakan negara kepulauan, perusahaan pengapalan tidak berkembang secara optimal. Dari 400 perusahaan yang diberikan izin, hanya sekitar 50 persen yang beroperasi. Akibatnya, pengangkutan sekitar 95 persen dari 5,0 juta peti kemas ekspor setiap tahunnya dan 55 persen dari 80 juta ton barang yang diangkut antarpulau masih dilakukan oleh kapal milik perusahaan asing.

"Dari jasa pengangkutan ini, kapal milik perusahaan asing itu mampu meraup pendapatan minimal 10 miliar dollar AS per tahun. Pendapatan akan terus bertambah seiring dengan meningkatnya volume barang yang diekspor dan diangkut antarpulau," kata Agustomo, pemimpin Dewan Maritim Indonesia di Jakarta, Rabu (16/4).

Total barang ekspor yang diangkut kapal berbendera asing sekitar 4,75 juta peti kemas. Jika biaya pengangkutan sebesar 2.000 dollar AS per peti kemas, berarti pendapatan yang diraih 9,5 miliar dollar AS per tahun.

Kalau barang yang diekspor harus transit lagi di Singapura, maka dikenakan biaya 60 dollar AS per peti kemas. Biaya ini dibebankan kepada kalangan eksportir. Total biaya transit, 285 juta dollar AS per tahun.

Selain itu, untuk barang ekspor akan dipungut lagi biaya bongkar muat (*terminal handling charge*/THC) 150 dollar AS per peti kemas, atau 712,5 juta dollar AS. Ini berarti, dari ekspor saja, negara kehilangan devisa 10 miliar dollar AS.

"Andai kata ditambah lagi dengan ongkos pengangkutan antarpulau, maka setiap tahun kapal-kapal berbendera asing selalu meraih pendapatan hingga belasan miliar dollar AS. Aneh, tapi itulah kenyataannya," kata Agustomo.

Tak ada insentif

Menurut Agustomo, penyebab utama adanya dominasi kapal berbendera asing adalah kemampuan perusahaan pelayaran nasional sangat terbatas. Kapal berbendera RI umumnya maksimal mengangkut 10.000 ton, sedangkan kapal asing jauh melebihi kapasitas tersebut.

Ketidaksanggupan perusahaan nasional untuk bersaing juga diakibatkan oleh rendahnya perhatian dan kepedulian pemerintah dan Bank Indonesia. Kedua institusi itu tidak memberikan insentif fiskal dan kredit murah bagi perusahaan pelayaran dan industri kapal, termasuk kemudahan fasilitas lainnya.

Selain itu, belum diratifikasinya konvensi internasional tentang penjaminan kapal juga menyebabkan kapal belum dapat dijadikan kolateral dalam proses pengadaan kapal dengan pola sewa beli.

Ada pola lain untuk mendapatkan kapal, yakni hibah dan bantuan lunak. Hanya saja, hal ini pun belum cukup jika tidak ditunjang sejumlah infrastruktur lain, seperti industri galangan, mekanisme dan kemudahan pengadaan suku cadang, bungker minyak, serta pengawakan yang andal.

Di sejumlah negara maju, seperti Amerika Serikat, diterapkan lagi asas *cabotage*. Asas tersebut mewajibkan perlindungan terhadap semua kelangsungan hidup armada kapal nasional.

Bahkan, AS juga memberlakukan Jones Act, undang-undang yang mengharuskan semua kapal yang mengangkut kargo antardua pelabuhan di negara tersebut harus dibangun di galangan kapal di AS, lalu diawaki pelaut AS dan dimiliki warga AS.

"AS saja memberikan perlindungan yang luar biasa terhadap industri maritim setempat. Ironinya, Indonesia malah tidak pernah mendorong dan memberikan iklim yang kondusif bagi perkembangan industri maritim," kata Agustomo.

Tentang transit barang di Singapura, dia menilai, pola ini hanya menguntungkan negara itu. Bahkan, semakin menurunkan daya saing komoditas tertentu asal Indonesia di negara tujuan, seperti ikan dan udang.

"Dengan transit, waktu tempuh menjadi lebih lama. Barang yang diekspor mudah rusak, daya saing semakin rendah di negara tujuan," ujar Agustomo, yang berharap pemerintah lebih serius menangani maritim.

(JAN/NIC)

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : JUMAT / 11 / OKTOBER / 2002
Hlm/Kolom : 2 / 1-4
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat /
Penulis :
No_Klass/Subjek : 627.2 73 / PELABUHAN AMERIKA

Pelabuhan Amerika Serikat Kembali Aktif

SAN FRANSISCO, KAMIS — Sebanyak 29 pelabuhan di pantai Barat AS dibuka kembali setelah terhenti selama 10 hari. Akan tetapi, dibutuhkan minimal enam pekan untuk mengejar tugas-tugas yang sudah menumpuk. Meski dibuka, sejumlah kerusakan berupa kerugian materi telah terjadi, setidaknya 15 milyar dollar AS.

Di lapangan, truk-truk sudah mulai berseliweran ke dermaga. Para pekerja memprioritaskan pengeluaran barang-barang yang mudah rusak, karena khawatir membusuk dan mengeluarkan bau busuk. Akan tetapi, kemacetan di pelabuhan diakibatkan antrean truk-truk terjadi.

Kegiatan bisnis berjalan seperti Bumi berputar, tak berhenti. Oleh sebab itu, penutupan itu sudah sangat merepotkan sejumlah perusahaan. "Kami memerlukan beberapa minggu untuk mengembalikan aktivitas bisnis kami kembali normal," demikian Jubir Wal-Mart, usaha eceran terbesar dunia berbasis di AS, Tom Williams.

Pelabuhan itu terhenti karena pemilik armada perkapalan dan pengelola terminal peti kemas melarang buruh pelabuhan bekerja, karena jengkel dengan aksi "kerja lambat" buruh pelabuhan.

Pembukaan pelabuhan itu, juga sedikit terlambat bagi Mitsubishi, yang pada hari Rabu (9/10) lalu, sempat menghentikan kegiatan pabrik di Illinois karena kekurangan pasokan mesin-mesin dan transmisi. "Kami berhenti hingga Jumat. Kami akan memulai produksi sesegera mungkin," ujar Jubir Mitsubishi, Dan Irvin.

Bursa saham juga sudah bereaksi negatif atas penutupan pelabuhan itu. Penurunan harga-harga saham di Wall Street terjadi karena pasar sudah mengetahui bahwa penutupan pelabuhan sempat menganggu aktivitas bisnis, dan dengan demikian akan mempengaruhi kinerja keuangan. (AFP/MON)

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : SABTU / 5 / APRIL / 2003
Hlm/Kolom : 32 / 1-3
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis : WIDARNAKO, BUDI
Subjek / NO. CLASS : PERANG AIR / 628.1

Perang Air, Profit Versus Hak Asasi

-- Catatan dari The Third World Water Forum (WWF3), Kyoto-Osaka-Shiga

KETIKA perhatian dunia terfokus pada serangan militer Amerika Serikat (AS) dan sekutunya atas Irak, di arena lain terjadi perang yang tidak kalah dahsyat dampaknya bagi kehidupan dan peradaban manusia. Genderang "perang" air ditabuh di WWF3, 16-23 Maret 2003 di tiga kota, Kyoto, Osaka, dan Shiga.

SEBUAH "drama" pengambilalihan panggung diskusi menandai perang antara pendukung dan penentang privatisasi air yang berlangsung dalam sesi utama di Aula Utama Kyoto International Convention Center 21 Maret lalu. Sesi dengan pembicara utama mantan

Direktur IMF Michel Camdessus yang melaporkan hasil kerja (18 bulan) *World Panel on Financing Water Infrastructure* (WPFWI) itu sempat terhenti sekitar 15 menit karena di tengah jalannya diskusi tiba-tiba para aktivis anti-privatisasi air dari segenap penjuru dunia naik ke panggung dan membentangkan spanduk-spanduk protes.

Meski, demonstrasi *indoor* ini berlangsung tidak anarkis namun tak urung suasana tegang dan emosional sempat mencekam ruang yang dipadati sekitar 1.000 orang.

Diawali interupsi seorang aktivis, ketua sidang sesi itu Margaret Catley-Carlson (dari Global Water Partnership) terpaksa memberi kesempatan para aktivis LSM untuk mengajukan tanggapan. Lalu, meluncur sejumlah serangan tajam atas laporan Camdessus, termasuk oleh aktivis lingkungan berpengaruh Dr Vandana Shiva dari India.

Lalu, ketua sidang memberi kesempatan para pembicara resmi namun para aktivis tetap menuntut mendapat waktu lebih panjang. Karena tuntutan ditolak, mereka *walk-out* sambil sebelumnya "menduduki" panggung pembicara.

Privatisasi

Dari ungkapan *water for life not for profit* yang terpampang di spanduk-spanduk dan diteriakkan sebagai yel-yel, terbaca apa sasaran penolakan para aktivis lingkungan itu.

Dalam sebuah kesempatan tanya-jawab seorang aktivis dari Bolivia menegaskan, yang dia tolak bukan halaman per halaman atau kalimat tertentu dari laporan Camdessus, tetapi dia menolak "jantung" laporan itu (*the heart of the report*). Dalam pandangan para aktivis, laporan Camdessus amat pro-privatisasi.

Jika dicermati laporan WPFWI pimpinan Camdessus setebal 54 halaman berjudul *Financing Water for All* itu memang mendorong privatisasi, meski dikemas dalam istilah yang ramah, *public-private partnership*.

Privatisasi diangkat sebagai salah satu opsi untuk mencapai sasaran pembangunan milenium yang dicanangkan KTT Bumi Johannesburg 2002, yaitu mereduksi separuh proporsi penduduk dunia yang tidak memiliki akses terhadap air pada tahun 2015.

Premis generik untuk mendukung opsi privatisasi, terutama di negara-negara berkembang, adalah inefisiensi dan kelemahan teknik serta manajemen yang melekat pada institusi publik pengelola air bersih. Inilah pintu masuk bagi korporasi swasta untuk terlibat dalam jasa penyediaan air bersih.

Menurut pihak korporasi, pengelolaan jasa penyediaan air minum oleh sektor publik menciptakan lingkaran setan dengan tarif rendah sebagai biang keladi sehingga biaya "produksi" tidak tertutup (*low cost recovery*). Hal itu memicu inefisiensi, buruknya perawatan jaringan air bersih dan bermuara pada penurunan mutu pelayanan. Pihak korporasi mengklaim mampu memutus lingkaran setan dengan penyesuaian tarif. Dan masuknya swasta, konsumen biasanya harus membayar tarif lebih tinggi.

Laporan Camdessus, gamblang merekomendasi korporasi swasta untuk terjun ke sektor air. Dalam salah satu rekomendasinya, WPFWI mendorong kebijakan pemerintah memberi jaminan keuntungan (*predictable revenue framework*) kepada pelaku pelayanan air, baik publik maupun swasta. Lebih jauh lagi, WPFWI merekomendasi kepada pemerintah daerah untuk mendorong instansi di bawahnya yang melakukan fungsi pelayanan penyediaan air (di Indonesia: Perusahaan Daerah Air Minum, PDAM) melakukan kontrak kerja dengan mitra swasta. Padahal, pengalaman selama ini menunjukkan, privatisasi air di berbagai belahan dunia telah menjadi lahan segelintir korporasi-korporasi raksasa transnasional seperti Vivendi, Suez, Thames, ABB, dan Bechtel.

via kini dituntut Bechtel membayar kerugian 25 juta dollar AS. Resistensi atas rencana privatisasi telah menyebar di kota-kota yang menunjukkan gairah untuk itu.

Selain kenaikan tarif, masih ada beberapa hal lain yang menjadi dasar penolakan privatisasi air. Sering terjadi, pemilihan korporasi swasta sebagai mitra sudah sarat nuansa KKN. Pada kasus Jakarta, misalnya, masuknya dua korporasi transnasional, Suez dan Thames, untuk bermitra dengan PAM Jaya sebagai produk penunjukan langsung, bukan melalui lelang terbuka. Kedua korporasi raksasa itu dapat melenggang masuk berkat aliansinya dengan perusahaan lokal yang dekat pusat kekuasaan (lihat Laporan khusus *Public Citizen-Water Privatization Fiascos: Broken Promises and Social Turmoil*- Maret 2003). Protes juga dipicu pelanggaran janji yang ada dalam kontrak kerja, seperti perluasan jaringan pelayanan dan peningkatan mutu air.

Di luar semua itu, sebenarnya argumen paling fundamental untuk menentang privatisasi air adalah bahwa akses atas air bersih adalah HAM, seperti dideklarasikan PBB September tahun lalu.

Menariknya argumen ini juga digunakan sebagai justifikasi privatisasi. Dengan kemampuan finansial dan efisiensi manajerialnya, korporasi swasta merasa mampu membantu mewujudkan pemenuhan hak atas air bersih bagi milyaran penduduk dunia yang masih belum memiliki akses.

Sebaliknya, menurut kubu penentang sebagai hak asasi akses terhadap air bersih hanya dapat dijamin perwujudannya jika pengelolaan sumber daya air tetap berada di sektor publik.

Adalah tanggung jawab politik sepenuhnya dari tiap pemerintahan untuk menjamin akses air bersih setiap individu warga negaranya. Jika kewajiban itu lalu dialihkan ke pihak swasta, maka akan terjadi praktik komodifikasi dan komersialisasi air.

Memperlakukan air sebagai komoditas dan memperdagangkannya merupakan sebuah pelanggaran etika kehidupan. Bagaimana mungkin memberi harga pada air?

Air adalah senyawa paling vital dan intim dalam kehidupan manusia. Keyakinan bahwa air

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : ...../...../...../.....
Hlm/Kolom : ...../.....
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat / .....
Penulis : .....
Subjek : .....

adalah berkah dan sumber segala kehidupan adalah nilai universal yang terus hidup dalam tradisi, kepercayaan, dan bahkan agama yang dianut masyarakat dunia.

Air bukan sekadar untuk kehidupan, tetapi ia adalah kehidupan sendiri. Dalam WWF3 ini, ada dua slogan yang sedang bertarung, yaitu *water for life* dan *water is life*.

Kehati-hatian

Seolah terisolasi dari konflik di atas, di Indonesia kini gairah privatisasi air juga sedang marak. Banyak PDAM yang tampaknya akan segera mengikuti jejak PAM Jaya (Jakarta). Meski beberapa dari mereka sebenarnya tidak punya masalah berarti dalam operasinya. Privatisasi terkesan menjadi jalan pintas dan mudah. Kecenderungan ini

Aires (Argentina), dan Cochabamba (Bolivia). Yang terakhir ini diwarnai terpentalnya Bechtel (korporasi AS) karena penyediaan air diambil alih masyarakat yang kecewa terhadap kenaikan tarif yang tinggi.

Akibatnya, Pemerintah Boli-

tentu perlu dicermati semua pihak, termasuk masyarakat pengguna jasa PDAM. Sebagai *stakeholder* mereka justru seharusnya perlu dilibatkan dalam penentuan masa depan pengelolaan jasa penyediaan air.

Pilihan privatisasi harus didasarkan kepentingan *stakeholder* bukan mengandalkan studi kelayakan sepihak yang didanai uang hibah atau pinjaman lembaga-lembaga keuangan internasional. Pada era otonomi daerah ini banyak "iming-iming" dana dari lembaga keuangan internasional

"Privatisasi diangkat sebagai salah satu opsi untuk mencapai sasaran pembangunan milenium yang dicanangkan KTT Bumi Johannesburg 2002."

Pada tataran global, prospek privatisasi air memang amat menjanjikan. Jika saat ini privatisasi baru mencakup lima persen dari pasokan air bersih global, maka diperkirakan dalam kurun 10 tahun ke depan 1,16 milyar orang akan menggunakan air "swasta" (Olivier Hoedeman dalam *Truth Behind Water Privatization*, JACSES Maret 2003).

Pasar utama air "swasta" adalah negara-negara berkembang di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Tahun lalu, Vivendi, korporasi air terbesar di dunia, penjualannya di Asia dua kali lipat dari tahun sebelumnya mencapai 647 juta dollar AS dan diprediksi angka itu akan terus meningkat di tahun-tahun mendatang (*International Herald Tribune*, 17/3/2003).

Negara berpenduduk besar seperti Cina dan India merupakan lahan ekspansi pasar korporasi- korporasi air transnasional. Di Indonesia sendiri meski belum terlalu agresif, pendekatan korporasi-korporasi air transnasional sudah mulai dijalankan di berbagai daerah.

Hak asasi

Namun, seperti digambarkan di awal tulisan ini, tidak sedikit sandungan dan oposisi yang dihadapi korporasi-korporasi transnasional, bukan hanya di negara miskin, tetapi juga di negara kaya, termasuk AS. Dalam WWF3, puluhan kisah kegagalan privatisasi air disuarakan masyarakat sipil (*civil society*) dari kota-kota di berbagai belahan dunia, seperti Manila (Filipina), Atlanta (AS), Buenos

yang "berseliweran" di daerah-daerah tingkat dua kita.

Agar tidak berujung konflik dan kerugian masyarakat—khususnya kelompok miskin—maka sudah selayaknya tiap PDAM harus mempertimbangkan dengan penuh kehati-hatian opsi privatisasi yang akan diambilnya.

Bahkan, dalam salah satu sesi WWF3 ini, Alain Mathys (eksekutif Suez) menegaskan jika sektor publik (seperti PDAM di Indonesia) mampu beroperasi efisien dan menyediakan air yang mencukupi, baik kuantitas maupun kualitas, kepada pelanggannya maka opsi privatisasi sama sekali tidak perlu.

Dengan akal sehat saja bisa dipastikan, minat korporasi transnasional untuk masuk ke kota-kota kita pasti didorong prospek keuntungan. Bagaimana tidak?

Selain monopolistik, penyediaan air bersih adalah "bisnis" yang permintaannya selalu ada tiap saat dan akan terus meningkat. Jadi, sebenarnya opsi privatisasi tidak terlalu menarik karena "keuntungan" harus dibagi.

PDAM dengan dukungan masyarakat penggunanya seharusnya mampu mengembangkan usahanya secara mandiri. Tetapi, semuanya ini berpulang tentu pada kemauan politik pemprov/pemkot dan PDAM untuk memilih jalan pintas privatisasi atau berjuang mengembangkan usahanya dengan lebih mengedepankan prinsip profesionalisme dan akuntabilitas.

PROF BUDI WIDIANARKO
Ketua Program Magister Lingkungan dan Perkotaan Unika Soegijapranata, Semarang

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : Jum'at / 11 / Oktober / 2002
Hlm/Kolom : 20 /
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat /
Penulis :
No_Klass/Subjek : 629.13 / PENERBANGAN

Gubernur Bantah Sutera Airlines Beroperasi Tanpa Izin

MEDAN, KOMPAS — Gubernur Sumatera Utara (Sumut) T Rizal Nurdin membantah bahwa perusahaan penerbangan Sumatera Utara Airlines (Sutera Airlines) beroperasi tanpa izin. Menurut Gubernur, untuk sementara maskapai penerbangan milik warga Sumut itu masih menggunakan izin perusahaan swasta.

"Perizinan sedang diurus, sedangkan untuk sementara kami menggunakan izin Global (PT Rabin Global Air Servindo). Saya kira hal itu sah-sah saja. Departemen Perhubungan pun tidak bermasalah," ujar Nurdin usai menghadiri rapat rencana perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut, Kamis (10/10).

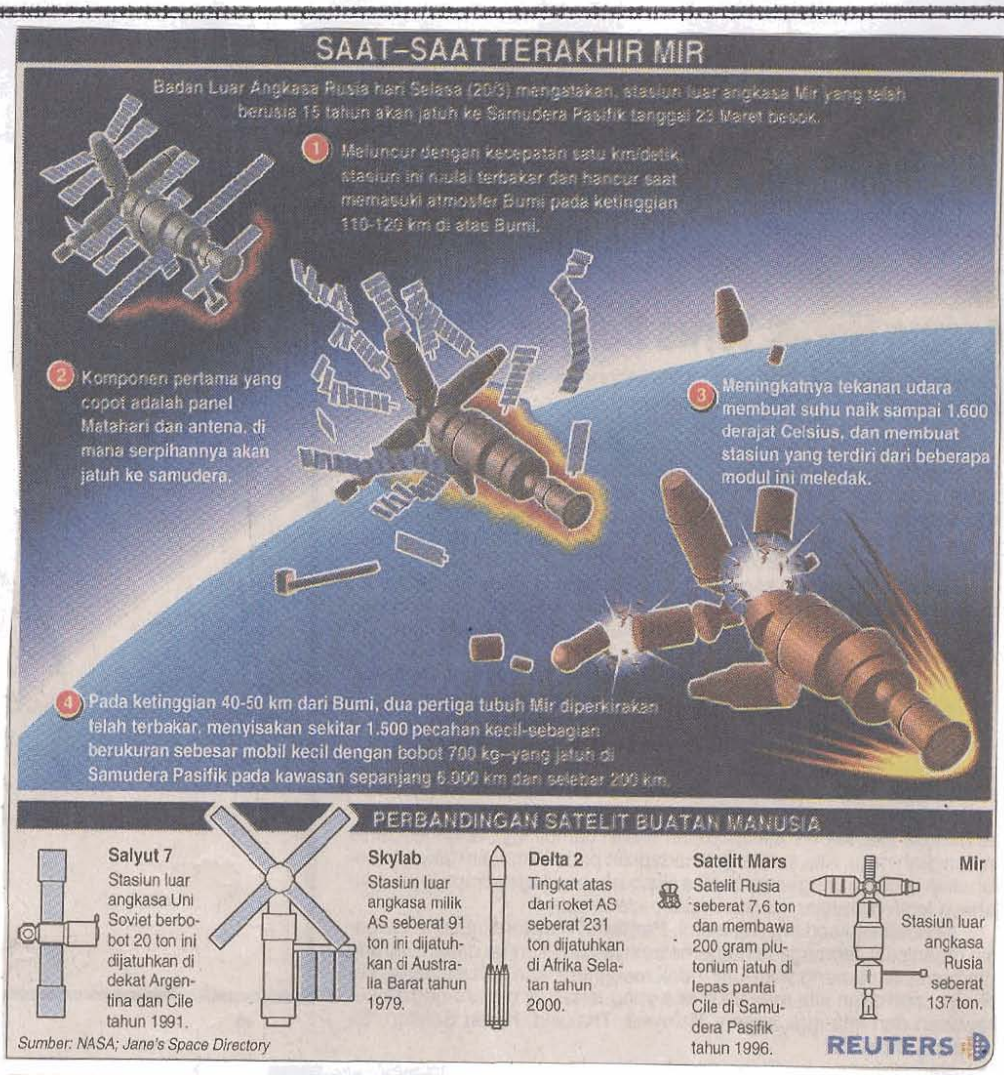
Dalam mengoperasikan penerbangan tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut menggandeng perusahaan swasta PT Rabin Global Air Servindo, dengan syarat perusahaan tersebut beroperasi dengan menggunakan nama Sumatera Airlines. "Provinsi telah sepakat dengan para bupati dan wali kota untuk menggunakan satu perusahaan yang bisa menerbangi jalur itu. Risikonya, perusahaan tidak mau rugi, jadi kalau kapasitas g tidak terpenuhi tentu harus disubsidi," kata Nurdin.

Maskapai penerbangan Sutera Airlines mulai dioperasikan secara komersial sejak 7 Oktober 2002, bertepatan dengan peresmian perubahan nama Bandara Pinang Sori di Sibolga, ibu kota Kabupaten Tapanuli Tengah, oleh Menteri Perhubungan Agum Gumelar. Dengan dioperasikannya angkutan udara ini, Pemprov Sumut mengharapkan agar keterisolasian kabupaten-kabupaten yang berada di wilaya Pantai Barat Sumut dapat di akhiri.

Menurut Nurdin, status Sutera Airlines bukan sebagai perusahaan daerah, sehingga tidak berorientasi untuk mencari keuntungan. Ia berulang kali menegaskan bahwa yang terpenting bagi pemerintah adalah bagaimana roda ekonomi di daerah pantai barat bisa berjalan semakin cepat dengan adanya angkutan udara.

"Tanggung jawab utama adalah membuka keterisolasian di sana," ujarnya. Selain melayani angkutan penumpang, Sutera Air Lines juga menyediakan jasa angkutan barang (kargo). Hal ini untuk menampung potensi daerah pantai barat di bidang perikanan dan pertanian. (Mos)

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : KAMIS / 22 / MARET / 2001
Hlm/Kolom : 3 / 5-7
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis :
No_Klass/Subjek : 629.44 / STASIUN ANTARIKSA



Cile Protes soal Mir

Santiago, Rabu

Pemerintah Cile hari Selasa (20/3) memerintahkan duta besarnya di Moskwa (Rusia) untuk memboikot acara mengamati jalannya peluncuran stasiun luar angkasa Mir kembali ke Bumi hari Jumat besok. Menurut Menteri Luar Negeri Soledad Alvear, ini merupakan protes Cile terhadap Rusia yang menjatuhkan stasiun luar angkasanya di Pasifik Selatan.

Instruksi boikot ini merupakan langkah terakhir Cile, setelah sebelumnya mengungkapkan ketidaksenangan mereka terhadap rencana Rusia yang hendak menjatuhkan Mir di antara Selandia Baru dan Cile. Dalam jumpa pers hari Selasa, Alvear mengatakan bahwa Cile kini tengah mencoba menggalang peraturan internasional yang bisa mencegah Pasifik sebagai tong sampah bagi rongsokan stasiun luar angkasa.

Pekan lalu, para anggota Partai Demokrasi berdemonstrasi di depan Kedutaan Besar Rusia di Santiago dan mengungkapkan kekecewaan mereka. Pemimpin partai, Guido Girardi, meminta Dubes Rusia di Cile Vladimir Chkhikvadze untuk menyampaikan pada pemerintahnya agar "berhenti memanfaatkan Samudera Pasifik sebagai tong sampah sisa-sisa pesawat dan stasiun luar angkasanya."

Stasiun berumur 15 tahun ini dijadwalkan terbakar dan jatuh ke Samudera Pasifik, Jumat (23/3) pukul 13.20 WIB. Diperkirakan dua pertiga dari tubuh Mir terbakar dan hancur begitu memasuki atmosfer Bumi. Potongan besar yang utuh jatuh kemungkinan berbobot 20 ton, dan sisanya hancur menjadi 1.500 serpihan, yang bobotnya bisa mencapai 700 kg.

Kemarin, stasiun Mir telah diturunkan hingga ketinggian 220 km di atas Bumi. "Inilah ketinggian di mana proses kejatuhan berawal dan berpuncak pada hari Jumat," ujar juru bicara Pengontrol Misi, Valery Lyndin, di Moskwa. "Langkah berikutnya adalah membawa Mir ke posisi stabil hari Kamis," ujarnya. Jika posisi Mir tidak stabil, proses kejatuhannya akan tak terkontrol.

Stasiun Mir telah dibuat bergerak lebih pelan dibanding sebelumnya sejak akhir bulan Januari, ketika para pejabat luar angkasa mencoba menyelamatkan baterainya yang tidak stabil dan menghemat bahan bakar yang akan digunakan untuk pulang kembali ke Bumi.

(Reuters/AP/AFP/fit)